

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1.1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : Koperasi Serba Usaha (KSU) Misykat
Alamat Perusahaan : Jalan Pak Gatot Raya No. 16 RT 07 RW 03 Kel.Gegerkalong
Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bidang Usaha : Koperasi Serba Usaha
No. Telp : 022-82002629
Email : ksu.misykatdt@gmail.com
Jam Kerja : Senin – Jum’at, 08-00 – 16-00

1.1.2 Sejarah Singkat Koperasi Misykat

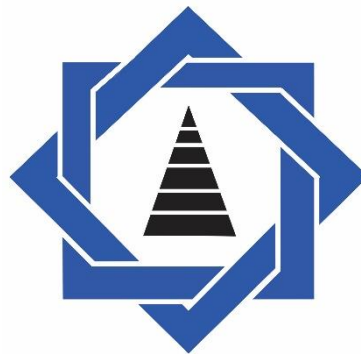
Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang sudah berbentuk badan hukum yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992. Dalam bahasa Arab ‘Misykat’ berarti cahaya (lentera). Dengan arti tersebut secara filosofis koperasi ini diharapkan mampu menjadi penerang dari kegelapan menuju cahaya kesejahteraan sebanyak-banyaknya anggota. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) pada tanggal 22 April 2002 mulai merintis suatu program pemberdayaan ekonomi ummat yang dinamakan program MiSykat (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) dan pada tanggal 22 April 2003 program MiSykat ini diresmikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar di Gedung Daarul Ilmi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung. Selama lima tahun ini program MiSykat menjadi sebuah program unggulan DPU DT.

Seiring dengan perkembangan, perjalanan dan tuntutan zaman dan pemandirian program-program yang ada di DPU DT, maka pada tahun 2009 program MiSykat ini

didorong untuk mandiri dengan memiliki badan hukum sendiri (*independent*) dan dapat membiayai operasional lembaganya sendiri.

Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Bapak H. Asep Hikmat pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 di ruang rapat DPU DT Bandung, maka secara resmi terbentuklah Koperasi Serba Usaha (KSU) Misykat. Aktifitas utama yang dijalankan oleh KSU Misykat ini adalah menyelenggarakan kegiatan perniagaan dalam upaya mensejahterakan anggota melalui unit atau divisi Niaga dan memberdayakan dhu'afa melalui unit atau divisi Pembiayaan.

1.1.3 Logo Koperasi Misykat



KOPERASI MISYKAT

Gambar 1. 1 Logo Koperasi Serba Usaha Misykat

Sumber : Arsip Perusahaan

Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa logo Koperasi Serba Usaha (KSU) Misykat memiliki 4 makna, antara lain:

1. Segi delapan adalah symbol arah mata angin, juga disebut sebagai simbol *asnaf mustahiq* zakat; tampak seperti ikatan (saling mengikat) menunjukkan bahwa sasaran KSU Misykat adalah asnaf mustahiq zakat dengan harapan besar asnaf ini saling menguatkan diri dalam satu ikatan KSU Misykat.
2. Segitiga adalah simbol yang sangat esensial dari kestabilan dan keseimbangan, maksudnya adalah kestabilan dan keseimbangan sebuah organisasi KSU Misykat.

3. Dalam segitiga terdapat enam anak tangga sebagai simbol rukun Iman, berwarna hitam symbol kekuatan, netral dan terkesan elegan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang lain, memiliki lima garis putih sebagai simbol rukun Islam dan melambangkan tanda kesucian islam dan kemurnian hamba mengabdikan kepada sang khaliq. Segitiga menunjukkan perjalanan menuju tujuan yang satu, adapun tangga sebagai alat perjalanan menuju tujuan tersebut.
4. Typography menggunakan jenis huruf ‘Cambria’ yang mempunyai ketebalan huruf seperti jenis ‘Sans Serif’ yang memberikan kesan efisien dan tingkat kepercayaan yang tegas. Cambria ini memiliki kelebihan tidak melelahkan mata saat kita membacanya.

1.1.4 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Misykat

Visi

“Menjadi koperasi mandiri, mensejahterakan anggota dan berperan aktif mendukung pencapaian visi Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid”

Misi

1. Mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian.
2. Meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat menuju kesejahteraan anggota.
3. Berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi ummat berskala mikro.

Tujuan

1. Sebagai wujud partisipasi aktif pengembangan ekonomi ummat yang berwawasan syariah dengan mengedepankan profesionalitas.
2. Mendapatkan SHU yang besar untuk kesejahteraan anggota.
3. Mendapatkan bagi hasil, margin yang halal untuk keperluan operasional lembaga.

1.1.5 Azas dan Prinsip Koperasi Misykat

Azas

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Prinsip

Dalam melaksanakan kegiatannya KSU Misykat berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
7. Kerjasama antar koperasi.

1.1.6 Nilai-nilai Koperasi Misykat

Nilai-nilai yang membentuk budaya KSU MISYKAT berdasarkan kata MISYKAT itu sendiri. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Mandiri

Yakin atas kemampuan sendiri serta tidak melepaskan tanggung jawab, tetapi mencari jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas dan ikhlas dengan tetap berpedoman kepada sistem prosedur serta mempertimbangkan resiko.

2. Ikhlas

Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus lillahi ta'ala dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.

3. Semangat

Kerjasama Semangat kerjasama diantara karyawan, karyawan dengan pengurus, atau dengan LKMS lain, diyakini sebagai upaya mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi.

4. Kredibel

Kemampuan bekerja secara profesional (bekerja dengan memanfaatkan keahlian untuk pencapaian target-target perusahaan secara efektif, efisien dan optimal) dan dapat dipercaya oleh anggota.

5. **Amanah**

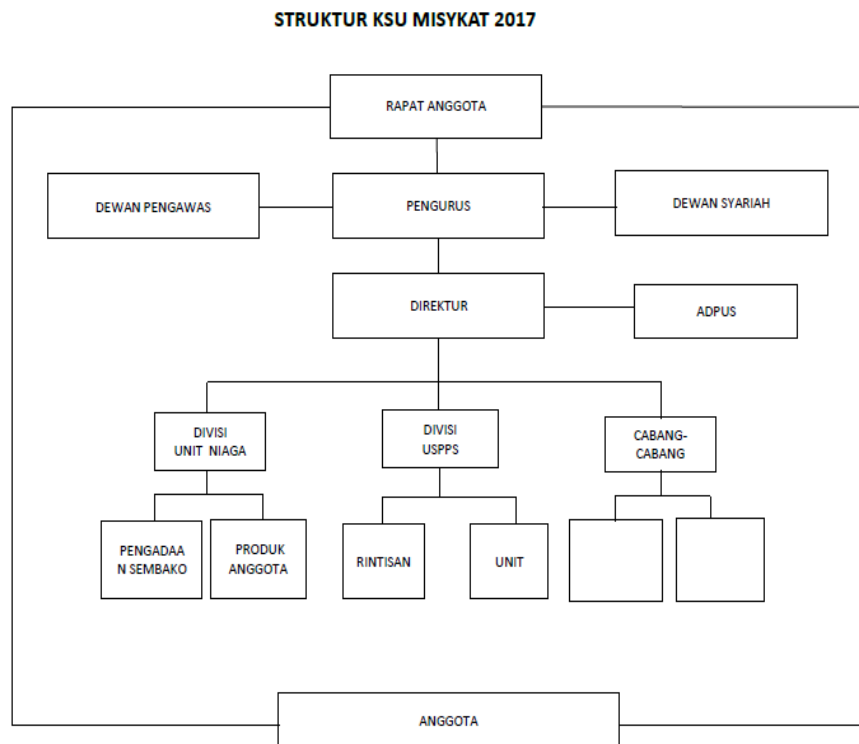
Bekerja dengan dilandasi kejujuran serta nilai-nilai ajaran Islam dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Amanah anggota adalah hal utama yang harus senantiasa dijaga untuk meningkatkan kepercayaan.

6. **Tawadlu**

Bekerja dengan rendah hati, tidak sombong dan tidak merendahkan pihak lain.

1.1.7 Struktur Organisasi

Setiap badan usaha didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai, termasuk koperasi. Tujuan tersebut akan menentukan luasnya pekerjaan yang akan dilakukan, maka dari itu dibutuhkan suatu struktur organisasi yang akan membagi antara wewenang dan tanggung jawab setiap posisi di dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi Koperasi Misykat adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi KSU Misykat

Sumber: Arsip Perusahaan

Keterangan :

a. Pengurus

Ketua : Iwan Firmansyah, S.Sos.
Sekretaris : Cecep Iwan Setiawan, S.Pd.
Bendahara : Hani Hanifah, S.Th.I.

b. Pengawas

Ketua : Herman, S.Sos
Anggota : Cucu Hidayat, Dede

c. Dewan Syariah

Mengikuti Dewan Syariah DPU DT

d. Pengelola

Manajer : Iwan Firmansyah, S.Sos.
Manajer Operasi : Hani Hanifah, S.Th.I.
Kadiv. Niaga : Cecep Iwan Setiawan, S.Pd.
Kadiv. USPPS : Rustandi, S.Pd.I.

e. Staff

Staff Operasi : Iis Jamilah, Siti Alfiah, Widia, Siti Herlina
Staff Niaga : Sidik
Staff USPPS : Ridwan, Dodi, Dadang, Fauzan, Asep, Ratna Komala,
Dalilahwati

1.1.8 Produk Layanan Koperasi Misykat

1. Pinjaman

a. Qord Hasan (Pinjaman Kebaikan)

Anggota hanya perlu mengambalikan pokok tanpa disertai margin. Hanya berlaku untuk plafon Rp. 500.000,-. Waktu pengembalian maksimal 50 pekan.

2. Pembiayaan

Anggota memberikan timbal balik/imbal jasa/keuntungan bagi lembaga. Akad disesuaikan dengan jenis pengajuan anggota. Berlaku untuk plafon > Rp. 500.000,00. Waktu pengembalian maksimal 50 pekan. Akad yang digunakan adalah Murobahah (Jual Beli), Ijaroh (jasa/sewa), dan Hiwalah (pengalihan hutang).

3. Simpanan

a. Simpanan pokok

Simpanan pertama anggota sebagai salah satu syarat keanggotaan.

b. Simpanan wajib

Simpanan yang wajib disetorkan anggota setiap pekan dan baru bisa diambil bila anggota keluar.

c. Tabungan sukarela

Tabungan dengan nominal dan waktu pengambilan disesuaikan oleh anggota.

d. Tabungan berencana

Tabungan dengan nominal dan waktu pengambilan disesuaikan dengan akad/perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama, misalnya tabungan pendidikan, tabungan persiapan menikahkan anak, dsb.

e. Tabungan cadangan

Tabungan yang melekat pada angsuran dan bisa diambil bila anggota telah melunasi pinjaman atau pembiayaannya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi penyokong gerak perekonomian di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Audretsch, Van der Host, Kwaak, dan Thurik, 2009; Carter dan Jones-Evans, 2006 dalam Aribawa (2016:1) yang mengatakan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Begitu pula, Kusumaningtuti anggota dewan komisioner OJK dalam Anggraeni (2015:23) mengatakan bahwa “UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia”.

Menurut Carrer dan Klomp, 1996; Adomoko, Danso, dan Damoah, 2016 dalam Aribawa (2016:1), “Keberadaan UMKM juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan cara penciptaan lapangan kerja” sehingga banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dapat terserap melalui adanya UMKM. Hartadi A Sarwono dalam sambutannya pada Profil Bisnis UMKM BI (2015:iv) mengatakan bahwa “Andil UMKM bagi perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. UMKM mempunyai tingkat

penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57%.”



Gambar 1. 3 Tren Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber : Warta KUMKM 2016

Data statistik menunjukkan pada tahun 2015, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro (98,73 persen). Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4 persen, dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7 persen dalam Warta KUMKM (2016:4). Oleh karena itu UMKM dapat ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Jumlah UMKM yang terus berkembang di Indonesia namun UMKM tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat dan pada beberapa kasus UMKM mengalami gulung tikar. UMKM yang tidak berbekal pengetahuan berwirausaha, manajemen usaha dan pengelolaan keuangan akan mengalami perkembangan yang lambat. Menurut Anggraeni (2016:23) Ada 4 kendala besar yang harus dihadapi para pelaku UMKM yaitu keterbatasan modal kerja, SDM, Inovasi produk dan teknologi serta pemasaran. Namun

yang sangat banyak terjadi dilapangan masalah permodalan adalah alasan klise banyak UMKM tidak berkembang.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah utama dalam UMKM karena jika pengelolaan keuangan dalam UMKM tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat kinerja dan mendapatkan akses pembiayaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ikem, *et.al* (2014) dalam Rita & Priyanto (2015:72) mengatakan bahwa sistem akuntansi dan pencatatan yang buruk itu bisa berdampak pada akses UKM ke keuangan. Untuk bisa mengakses ke lembaga keuangan, sangat tergantung pada kualitas informasi akuntansi yang mereka susun. Hal ini juga sependapat dengan Risnaningsih (2017:42) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis Usaha Mikro, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar.

Rita & Priyanto (2015:72) juga mengatakan bahwa UMKM sering mengalami kesulitan ataupun keengganan menerapkan akuntansi dalam bisnisnya. Belum adanya pencatatan keuangan yang baik dan rutin, yang penting barang dagangan dapat laku. Akibatnya jika mengakses ke pendanaan perbankan, mengalami kesulitan pemenuhan syarat administratif, sehingga jika butuh tambahan dana akan pinjam ke perorangan atau minta tempo pembayaran ke supplier.

Penulis menekankan permasalahan UMKM pada pengelolaan keuangan karena hal tersebut akan mempunyai pengaruh pada semua bidang manajemen UMKM seperti yang dikatakan oleh Meredith dalam Abanis *et.al* (2013:30) “*financial management is concerned with all areas of management, which involve finance not only the sources, and uses of finance in the enterprises but also the financial implications of investment, production, marketing or personnel decisions and the total performance of the enterprise*” yang dapat diartikan bahwa “pengelolaan keuangan berkaitan dengan semua bidang manajemen, yang melibatkan keuangan tidak hanya sumber, dan penggunaan keuangan di perusahaan tetapi juga implikasi finansial keputusan investasi, produksi, pemasaran atau personil dan kinerja total perusahaan.”

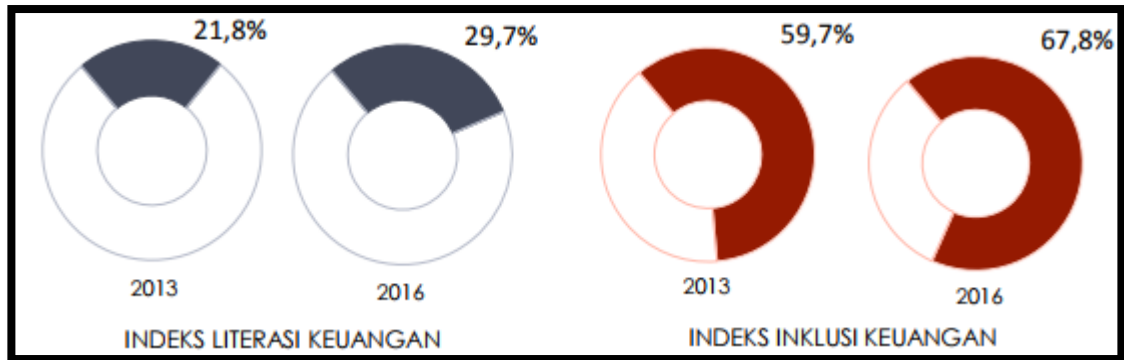
Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha. Menurut Ediraras (2010:153-154) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak yang positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri.

Namun pengelolaan keuangan UMKM ini disebabkan juga dengan rendahnya pengetahuan keuangan atau biasa disebut dengan literasi keuangan pada UMKM itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh Agus D.W. Martowardjojo Gubernur Bank Indonesia yang mengatakan bahwa “permasalahan dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak sebatas manajemen pengelolaan keuangan dan sumber daya yang terbatas saja, namun juga akses permodalan yang dimiliki para pelaku usaha. Rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab minimnya akses lembaga keuangan terhadap sektor tersebut.” (Sumber : www.cnnindonesia.com, diakses 2 Oktober 2017).

Jika pengetahuan akan keuangan tinggi maka akan membantu individu dalam pengelolaan keuangan. Hal ini juga disampaikan oleh OJK (SNLKI Revisit 2017: 17) bahwa literasi keuangan sudah menjadi *life skill* bagi setiap individu agar mereka dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Terkait dengan rendahnya tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia maka dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia revisit 2017, OJK membuat 3 program strategis untuk meningkatkan literasi keuangan yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan bijak, dan akses pembiayaan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, dimana tujuan ini sesuai dengan Peraturan OJK No 76/POJK.07/2017 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia dalam Anggraeni (2015:22) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya “20%”. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Filipina 27%, Malaysia 66% Thailand 73%

dan Singapura sebesar 98%. (Bank Pundi). Hal ini didukung dengan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dilakukan pada tahun 2016 terhadap 9.680 orang responden di 34 Provinsi. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016

Sumber : Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia OJK 2016

Menurut hasil survei yang dilakukan OJK tahun 2013 dalam Anggraeni (2015:23) tingkat literasi keuangan pada kelompok UMKM hanya sebesar 15,68%. Hal inilah yang menyebabkan UMKM di Indonesia sulit dalam pengelolaan keuangan dan mendapatkan akses pembiayaan. Literasi keuangan akan membantu bagi pelaku usaha terkait pengelolaan usaha dimulai dari anggaran, perencanaan simpan dana usaha, serta pengetahuan dasar atas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha menurut Greenspan dalam Anggraeni (2015:23).

Jumlah UMKM di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. UMKM di Bandung sendiri pertumbuhan UMKM juga sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut juga dikatakan oleh Priana Wira Saputra selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung yang mengatakan bahwa “Data dari BPS terakhir yang kita terima sekitar 300.000 UMKM yang ada di Bandung” (*Sumber: jabarprov.go.id* diakses pada tanggal 8 Oktober 2017)

Bandung tidak hanya memiliki jumlah UMKM yang banyak tetapi UMKM di Bandung mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan Kota Bandung

memperoleh penghargaan Natamukti Nindya sebagai kota dengan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) terbaik se-Indonesia menurut penilaian *Indonesia Council for Small Business* (ICSB) dan Kementerian Koperasi dan UKM. (sumber : *regional.kompas.com* diakses 2 Oktober 2017).

Dengan Jumlah UMKM tersebut di wilayah Bandung juga memiliki program pendampingan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan beberapa Lembaga salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (MISYKAT DPU DT). Informasi terakhir dari hasil wawancara dengan pengurus KSU Misykat DPU DT tercatat sebanyak 1.726 UMKM menjadi anggota binaan dari KSU Misykat mempunyai program pemberian pinjaman dan pendampingan yang di sertai dengan pemberian materi pada setiap minggunya. Kurikulum materi yang diberikan saat pendampingan pada UMKM adalah mengenai tabungan, pinjaman dan pembiayaan, ekonomi rumah tangga robbaniyah 1 dan 2, pengelolaan keuangan, kewirausahaan muslim.

Adanya beberapa materi kurikulum pendampingan mengenai pengetahuan keuangan hal ini menjadi salah satu bentuk upaya MISYKAT dalam memberikan edukasi mengenai bagaimana mengelola keuangan. Dari hasil wawancara dari salah satu petugas pendamping harian Misykat bapak Dodi menyatakan bahwa anggota-anggota Misykat memang terdapat kesulitan dalam pengelolaan keuangan termasuk pencatatan keuangan sangat sedikit sekali UMKM yang melakukan kegiatan pengelolaan keuangan hal ini dikarenakan usaha yang mereka jalani merupakan usaha mikro hal ini didasarkan pada data dari Misykat yaitu sebanyak 90% UMKM binaan Misykat termasuk kategori mikro, jadi banyak dari pelaku UMKM kurang memperhatikan mengenai pengelolaan keuangan. Pada rentang waktu Juni-Agustus 2016 yang lalu penulis juga menjadi salah satu peserta dari Program Pendampingan UMKM Syariah oleh Praktisi dan Akademisi (PUSPA BI) dimana objek UMKM yang didampingi adalah dari KSU Misykat DPU DT, saat itu penulis mendampingi UMKM yang berjualan kerupuk dan disana penulis juga menemukan kurangnya pengelolaan keuangan dari pelaku UMKM bahkan pencatatan keuangan juga dilakukan seadanya.

Pada sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Andrew (2014) dalam Yushita (2017:23) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku keuangan dimana semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang yang dimiliki akan cenderung lebih bijak dalam pengelolaan keuangannya.

Menurut penelitian terdahulu oleh Anggraeni (2015) pada obyek penelitian UMKM di Depok menghasilkan bahwa tingkat literasi yang rendah mempengaruhi pemilik usaha dalam mengelola keuangan usaha dengan kemampuan yang hanya sebatas pada pencatat tetapi belum dilakukan dokumentasi yang baik untuk penerimaan dan pengeluaran. Begitu pula dengan hasil penelitian Ida dan Dwinta, 2010 yang menyatakan bahwa *financial knowledge* mempengaruhi seseorang dalam *financial management behavior*.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis melihat adanya peluang riset untuk meneliti kondisi internal para UMKM dimana salah satunya adalah literasi keuangan. Sehingga, penulis tertarik untuk menjadikan variabel ini sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana variabel diatas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM melalui penyebaran kuisioner terhadap UMKM yang termasuk anggota binaan KSU Misykat di Bandung. Penelitian ini juga dapat mendukung program pemberdayaan UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan keberlangsungan UMKM

Hal – hal diatas menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM (Studi pada UMKM anggota binaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Misykat DPU DT di Bandung Raya Tahun 2017)”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pada UMKM di Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada UMKM di Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM di Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui tingkat literasi keuangan pada UMKM di Bandung.
2. Mengetahui pengelolaan keuangan pada UMKM di Bandung.
3. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM di Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi perusahaan terutama untuk mengembangkan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi khazanah keilmuan dibidang kewirausahaan khususnya yang berkaitan dengan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan dan beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.